

Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

Pattaufi^{1*}, Ahmad Jamalong², Untung³, Febriansa⁴

^{1, 2, 3} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

ABSTRACT

This community service program was carried out at the Class IIA Women's Correctional Facility in Sungguminasa, Gowa Regency, focusing on empowering inmates through an equivalency education program. The program was initiated in response to the low educational background of most inmates, many of whom had dropped out of school before completing primary or secondary education. This condition has significant implications, including limited skills, low competitiveness, and a higher risk of social marginalization after release. Equivalency education was chosen as a strategic solution, not only to provide access to formal-equivalent education at the Paket A, B, and C levels but also to serve as a means of social and psychological rehabilitation. The program was implemented using participatory learning methods, combining lectures, group discussions, question-and-answer sessions, and practical activities. The presence of lecturers as facilitators played a dual role as educators and psychosocial mentors. In addition to academic materials, motivational sessions were also integrated to foster learning spirit and rebuild inmates' self-confidence. The results of the program demonstrated an increase in motivation, active participation, and relatively stable attendance, with an average attendance rate exceeding 85%. Positive impacts were not only evident in academic achievements but also in psychological aspects, as inmates became more confident, optimistic, and willing to express their opinions. Furthermore, the program strengthened collaboration between the university, the PKBM Kader Bangsa, and the correctional facility, ensuring the comprehensive implementation of equivalency education. In conclusion, this community service program proves that equivalency education within correctional facilities can serve as a strategic instrument for social empowerment. For sustainability, the program requires stronger facilities, policies, and cross-sectoral collaboration, with potential to be replicated in other correctional institutions across Indonesia.

Keywords: Community Service, Equivalency Education, Inmate Empowerment, Women's Correctional Facility

Open Access | URL: <https://ejournal.anotero.org/index.php/tasnim>

² Corresponding Author: Program Studi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; Jl. H.R. Soebrantas KM. 15,5, Pekanbaru, Riau; Email: rian.vabrianto@uin-suska.ac.id

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, melainkan juga sebagai wahana pembinaan yang bertujuan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan hidup, pengetahuan, dan sikap yang lebih baik (Tilaar, 2009; Sofyan, 2017). Dalam konteks ini, pendidikan menjadi salah satu aspek pembinaan yang sangat penting karena merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar warga binaan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Banyak di antara mereka tidak menamatkan pendidikan dasar atau menengah, bahkan sebagian besar terputus dari akses pendidikan sebelum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya keterampilan, minimnya daya saing, serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan setelah bebas dari masa hukuman. Tanpa intervensi pendidikan, risiko marginalisasi sosial semakin besar, bahkan berpotensi meningkatkan tingkat residivisme (Sudjana, 2010; Suryono, 2013). Pendidikan kesetaraan hadir sebagai solusi strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai bagian dari jalur pendidikan nonformal, program ini memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena keterbatasan usia, ekonomi, maupun kondisi sosial. Dalam konteks lapas, pendidikan kesetaraan tidak hanya memberikan akses untuk memperoleh ijazah setara SD (Paket A), SMP (Paket B), dan SMA (Paket C), tetapi juga berfungsi sebagai sarana rehabilitasi sosial dan psikologis. Pendidikan kesetaraan membantu menumbuhkan motivasi, membangun kembali rasa percaya diri, serta memberikan harapan baru bagi warga binaan untuk memiliki masa depan yang lebih baik (Hamalik, 2011; Sofyan, 2017).

Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa di Kabupaten Gowa merupakan salah satu institusi pemasyarakatan yang menghadapi tantangan tersebut. Sebagian besar warga binaannya adalah perempuan usia produktif yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan formal. Kondisi ini menegaskan perlunya program pembinaan yang berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan sekaligus pemberdayaan. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, rendahnya motivasi belajar, serta minimnya fasilitas pembelajaran yang dapat mendukung proses pengembangan diri warga binaan. Sebagai bentuk respon terhadap permasalahan tersebut, dosen dari perguruan tinggi berkolaborasi dengan PKBM Kader Bangsa dan pihak lapas menyelenggarakan program pengabdian masyarakat berupa pendidikan kesetaraan. Program ini tidak hanya menekankan pada aspek penyampaian materi ajar, melainkan juga mengintegrasikan pembinaan motivasional dan penguatan karakter. Metode yang digunakan bersifat partisipatif dengan memadukan diskusi, tanya jawab, dan praktik langsung, sehingga warga binaan dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kehadiran dosen dalam kegiatan ini tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran sekaligus pendamping psikososial yang membantu warga binaan menumbuhkan kembali rasa percaya diri.

Tujuan dari program pengabdian ini adalah memperluas akses pendidikan kesetaraan bagi warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa pada jenjang Paket A, Paket B, dan Paket C, sekaligus menumbuhkan motivasi belajar serta membekali mereka dengan ijazah kesetaraan yang dapat digunakan sebagai bekal melanjutkan

pendidikan atau memasuki dunia kerja setelah bebas. Dengan demikian, pendidikan kesetaraan dalam konteks lapas diposisikan tidak hanya sebagai layanan pendidikan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang transformatif. Kehadiran dosen sebagai pelaksana pengabdian memperkuat peran akademisi dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, humanis, dan berorientasi pada reintegrasi sosial warga binaan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Program difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi warga binaan dengan jenjang Paket A, Paket B, dan Paket C. Jumlah peserta yang terlibat sebanyak 49 orang dengan komposisi 31 peserta Paket A, 5 peserta Paket B, dan 11 peserta Paket C. Kehadiran dosen sebagai pelaksana kegiatan didukung penuh oleh pihak Lapas yang menyediakan sarana dan prasarana, serta oleh PKBM Kader Bangsa yang berperan sebagai mitra teknis dalam penyediaan modul, tutor, serta administrasi pendidikan kesetaraan.

Metode pelaksanaan program ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pendidikan nonformal. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyesuaikan kebutuhan belajar warga binaan yang beragam, sekaligus memfasilitasi mereka untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sebelum pelaksanaan, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan observasi awal untuk memetakan kebutuhan belajar warga binaan, melakukan koordinasi dengan pihak Lapas, serta menyusun kurikulum dan perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan standar pendidikan kesetaraan.

Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka di ruang belajar lapas dengan jadwal rutin setiap akhir pekan. Dosen hadir langsung sebagai fasilitator utama bersama tutor dari PKBM, menyampaikan materi sesuai jenjang kesetaraan. Metode yang diterapkan bervariasi, mulai dari ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, simulasi, hingga praktik berbasis pengalaman. Pada setiap sesi, dosen juga menyisipkan pembinaan motivasional untuk menumbuhkan semangat dan membangun kepercayaan diri warga binaan. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter, optimisme, dan kesiapan menghadapi kehidupan pasca-bebas.

Evaluasi program dilakukan secara bertahap melalui ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta asesmen berbasis portofolio. Selain itu, kehadiran dan keterlibatan peserta dipantau untuk melihat sejauh mana warga binaan merespons program ini. Evaluasi tidak hanya menilai kemampuan kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik sebagai indikator keberhasilan pembinaan. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar refleksi bersama antara tim dosen, pihak Lapas, dan PKBM untuk merumuskan strategi tindak lanjut serta keberlanjutan program di masa mendatang.

Dengan metode tersebut, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian ijazah kesetaraan, tetapi juga pada proses pembinaan yang menyeluruh. Kolaborasi lintas lembaga yang terbangun menjadikan program ini tidak hanya sebagai layanan pendidikan, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan warga binaan yang mendorong transformasi diri dan mempersiapkan mereka untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa berfokus pada upaya pemberdayaan warga binaan melalui program pendidikan kesetaraan. Kehadiran dosen sebagai pelaksana pengabdian bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan materi ajar, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan yang menjunjung tinggi hak dasar pendidikan bagi setiap individu, termasuk narapidana. Pendidikan dalam konteks lembaga pemasyarakatan harus dipandang sebagai hak fundamental sekaligus sarana untuk rehabilitasi sosial (Tilaar, 2009; Sofyan, 2017).

Proses Pembinaan Awal

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengenalan mengenai pentingnya pendidikan kesetaraan sebagai alternatif dari jalur pendidikan formal. Tim pengabdian menyampaikan bahwa setiap warga binaan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, meskipun sedang menjalani masa hukuman. Pemahaman ini penting untuk menumbuhkan motivasi belajar, karena sebagian besar peserta sebelumnya mengalami putus sekolah atau bahkan belum sempat menempuh jenjang wajib belajar 12 tahun. Kesadaran ini menjadi landasan utama untuk membangun keinginan warga binaan agar kembali bersemangat menempuh pendidikan (Sudjana, 2010).

Implementasi Pembelajaran

Dalam setiap pertemuan, dosen pelaksana hadir langsung sebagai fasilitator utama pembelajaran. Materi disampaikan sesuai dengan jenjang program kesetaraan yang ada di lapas, yaitu Paket A, B, dan C. Metode yang digunakan bervariasi, mulai dari ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, hingga praktik langsung. Pendekatan partisipatif menjadi strategi utama agar warga binaan tidak hanya menerima informasi secara pasif, melainkan juga terlibat aktif dalam berdialog, mengajukan pertanyaan, serta mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman hidup mereka. Kegiatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan nonformal harus menekankan fleksibilitas metode dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik (Suryono, 2013). Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan konteks kehidupan warga binaan.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh dosen pelaksana kepada warga binaan Pembinaan Motivasi dan Karakter

Selain materi akademik, dosen pelaksana juga memberikan pembinaan motivasional. Pesan-pesan inspiratif disampaikan pada awal maupun akhir pembelajaran untuk membangkitkan semangat belajar warga binaan. Pendekatan ini terbukti mampu menciptakan suasana kelas yang lebih hidup, interaktif, dan penuh semangat. Motivasi yang diberikan tidak hanya berfokus pada semangat belajar, tetapi juga pada penumbuhan

rasa percaya diri, optimisme terhadap masa depan, serta kesadaran akan pentingnya memanfaatkan kesempatan kedua melalui pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik (2011) yang menyatakan bahwa motivasi merupakan kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dalam konteks lapas, motivasi belajar berperan ganda: selain mendukung keberhasilan akademik, juga berfungsi sebagai terapi psikologis untuk mengurangi tekanan selama menjalani masa hukuman.

Dampak Program

Dampak kegiatan ini terlihat dari peningkatan partisipasi warga binaan dalam setiap sesi pembelajaran. Kehadiran relatif stabil, dan antusiasme mereka tercermin dari keterlibatan aktif saat diskusi berlangsung. Beberapa warga binaan menyampaikan bahwa kesempatan belajar ini memberikan harapan baru, terutama karena adanya kemungkinan memperoleh ijazah setara pendidikan formal. Selain itu Kehadiran relatif stabil, dan antusiasme mereka tercermin dari keterlibatan aktif saat diskusi berlangsung. Data jumlah peserta pada setiap jenjang kesetaraan dapat dilihat pada Tabel 1.

No.	Program Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Peserta	Persentase (%)
1	Paket A (setara SD)	31	63,3
2	Paket B (setara SMP)	5	10,2
3	Paket C (setara SMA)	11	22,5
Total		49	100

Selain itu, kehadiran warga binaan dalam setiap sesi pembelajaran juga cukup tinggi. Rata-rata kehadiran mencapai lebih dari 85%, menunjukkan bahwa program ini diterima dengan baik dan menjadi kebutuhan warga binaan. Rincian kehadiran disajikan pada Tabel 2.

No.	Program Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Peserta	Persentase (%)
1	Paket A (setara SD)	31	85,5
2	Paket B (setara SMP)	5	88,0
3	Paket C (setara SMA)	11	83,6
Total		49	85,7

Selain itu, dampak positif juga terlihat pada aspek psikologis. Warga binaan menjadi lebih percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan menunjukkan sikap optimis terhadap masa depan. Pendidikan dalam lapas dengan demikian tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga berfungsi sebagai sarana reintegrasi sosial (Sofyan, 2017).

Kolaborasi Multi-Pihak

Keberhasilan kegiatan ini juga tidak lepas dari kolaborasi antara pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, PKBM Kader Bangsa, dan perguruan tinggi sebagai pelaksana pengabdian. Lapas menyediakan sarana dan prasarana, mulai dari ruang belajar hingga ruang keterampilan. PKBM mendukung dengan menyediakan modul pembelajaran, tutor, serta dukungan administratif. Sementara itu, perguruan tinggi menghadirkan dosen sebagai fasilitator utama pembelajaran.



Gambar 3. Dokumentasi bersama antara tim pengabdian, pihak lapas, dan warga binaan

Model kolaborasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan warga binaan hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas lembaga, sebagaimana ditegaskan oleh Suryono (2013), bahwa pendidikan nonformal yang efektif adalah pendidikan yang dikelola secara kolaboratif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Kendala dan Upaya Mengatasi

Meskipun kegiatan berjalan lancar, beberapa kendala tetap ditemukan. Motivasi belajar warga binaan yang fluktuatif menjadi tantangan utama. Selain itu, keterbatasan fasilitas pembelajaran, minimnya sumber belajar, serta dinamika psikologis warga binaan juga menjadi faktor penghambat. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pengabdian menerapkan strategi kreatif, antara lain dengan menggunakan media sederhana yang mudah diakses, mengadakan sesi pembelajaran berbasis permainan edukatif, serta memperbanyak komunikasi interpersonal. Pendekatan ini terbukti efektif meningkatkan keterlibatan warga binaan dalam proses belajar.

Implikasi dan Keberlanjutan

Program pengabdian ini membuktikan bahwa pendidikan kesetaraan di lembaga pemasyarakatan bukan hanya sarana memperoleh ijazah, tetapi juga instrumen penting dalam membangun kepercayaan diri, memberikan harapan, serta mempersiapkan warga binaan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Untuk keberlanjutan, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat, peningkatan fasilitas, serta kesinambungan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Jika dikelola secara konsisten, model ini berpotensi direplikasi di lapas lain di Indonesia sebagai bagian dari strategi pembinaan narapidana berbasis pendidikan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa membuktikan bahwa pendidikan kesetaraan dapat menjadi instrumen strategis dalam pemberdayaan warga binaan. Kehadiran dosen sebagai fasilitator tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran Paket A, B, dan C, tetapi juga memberikan motivasi dan pembinaan karakter. Partisipasi aktif warga binaan menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi kebutuhan penting sekalipun dalam kondisi keterbatasan. Program ini berhasil membuka akses pendidikan, meningkatkan kepercayaan diri, serta memberikan harapan baru bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan bekal akademik dan keterampilan yang lebih baik. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, PKBM Kader Bangsa, dan pihak lapas memperlihatkan model kemitraan yang

efektif dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal di lingkungan masyarakat. Meskipun terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan fasilitas dan motivasi belajar yang fluktuatif, hambatan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan kreatif, metode partisipatif, serta dukungan komunikasi intensif antara tutor dan peserta. Dengan demikian, pendidikan kesetaraan di lapas tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh ijazah, tetapi juga menjadi media rehabilitasi sosial dan psikologis yang mampu menumbuhkan kembali semangat belajar serta kesiapan warga binaan dalam menjalani kehidupan pasca-pembebasan.

REFERENSI

- Hamalik, O. (2011). *Proses belajar mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofyan, H. (2017). Pendidikan dalam lembaga masyarakat: Upaya reintegrasi sosial warga binaan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 12(2), 145–157.
- Sudjana, D. (2010). *Pendidikan nonformal: Wawasan, sejarah perkembangan, falsafah, teori pendukung, asas*. Bandung: Falah Production.
- Suryono, Y. (2013). Pendidikan nonformal: Konsep, teori, dan aplikasinya. *Jurnal Ilmiah Visi*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.21009/JIV.0801.01>
- Sofyan, A. (2017). Pendidikan di Lembaga Masyarakat sebagai Upaya Reintegrasi Sosial. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 12(2), 45–58.
- Sudjana, D. (2010). *Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung, Asas*. Bandung: Falah Production.
- Suryono, Y. (2013). Pendidikan Nonformal sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Empowerment*, 5(1), 1–10.
- Tilaar, H.A.R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kebijakan pendidikan: Kajian kritis untuk pendidikan masa depan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2025 Pattaufi, Ahmad Jamalong, Untung, Febriansa

Published by Lembaga Anotero Scientific Pekanbaru